ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA SEBAGAI TERORISME

Oleh : Marinus Lase

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Elmayanti, SH., MH

Alamat : Jl. Kembang Harapan, Cinta Raja, Sail, Pekanbaru

Email : marinuslase41@gmail.com - Telepon : 085346933907

ABSTRACT

At first the separatist movements that occurred in Papua were dealt with through the articles of treason in the Criminal Code (KUHP). However, on April 29, 2021, Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Moh. Mahfud MD, through Press Release No: 72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021, stated that organizations and people in Papua who commit massive violence are categorized as terrorists. The determination of the KKB in Papua is not in accordance with the applicable positive law, so it does not provide legal certainty. This is because political motives in the Scope of Law Number 5 of 2018 considers criminal acts of terrorism not as political crimes. The purpose of this study is to determine how the status of armed criminal groups in Papua is determined as terrorism in Indonesian criminal law and to find out how the legal consequences of determining the status of armed criminal groups in Papua as terrorism.

This type of research is normative legal research or library law research. This normative legal research is a study of the principle of legal certainty, where the government's policy in determining the status of armed criminal groups in Papua as terrorism does not provide legal certainty because the policy is not in accordance with the applicable criminal law. The data sources in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting data in this normative legal research used the literature review method. Based on the nature of this research which uses descriptive analytical research method, the data analysis used is a qualitative approach to primary data and secondary data.

The determination of KKB in Papua as terrorism does not have legal certainty because the government's policy to include KKB in Papua in DTTOT is not in accordance with the applicable positive law. From a positive legal perspective, the government (Menko Polhukam) should not have the authority to declare a group in society as a terrorist group or organization and terrorism should not be considered a political crime. After the determination of the status of the KKB in Papua as terrorism, the legal consequence is that law enforcement against these groups will be different from law enforcement in general as regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). The government in determining the status of the KKB in Papua as terrorism resulted in the government abusing its power and not based on applicable regulations. The legal consequences of determining the KKB in Papua as terrorism will make the KKB in Papua unable to be held criminally responsible.

Keywords : KKB in Papua - Terrorism - Separatism - Political Crimes

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya gerakan-gerakan separatis yang terjadi di Papua ditindak melalui pasal-pasal makar di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pada tanggal 29 April 2021 Menko Polhukam Moh. Mahfud MD, melalui Siaran Pers No: 72/SP/HM.01.02/ POLHUKAM/4/2021, menyatakan organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Artinya, KKB di Papua akan dimasukkan ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). Sehingga penegakan hukum yang akan diterapkan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua di tindak berdasarkan Undang-Undang Terorisme.

Separatisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tindak pidana makar yaitu Pasal 104, 106 dan 107 sementara tindak pidana terorisme sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Separatisme termasuk dalam kejahatan terhadap keamanan negara. Kejahatan terhadap keamanan negara (*misdrifven tegen veiligheid van de staat*) yang dimuat dalam Bab I Buku Kedua KUHP, mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 129. Dibentuknya kejahatan ini adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu dan merusak kepentingan hukum negara tersebut.¹ Menurut prespektif hukum pidana, separatisme tergolong sebagai kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Buku II Bab I KUHP, Pasal 104, 106 dan Pasal 107 tentang makar.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Terorisme memberikan batasan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Terorisme, dimana tindak pidana terorisme harus dianggap bukan tindak pidana politik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5, “Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Maksud pengecualian terhadap tindak pidana politik dalam Pasal 5 menurut Romli Atmasasmita, dimaksudkan agar gerakan atau aksi demonstrasi untuk melaksanakan hak-hak politik, sosial dan ekonomi dapat diwujudkan tanpa perlu adanya rasa takut dituduh sebagai teroris.² Sehingga, kejahatan atau delik-delik yang mempunyai motif politik dikecualikan dalam Undang-Undang Terorisme. Selain itu, Adapun tujuan dari pengecualian tindak pidana politik dalam undang-undang terorisme adalah agar dapat diekstradisinya para pelaku tindak pidana terorisme. Karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi merumuskan bahwa “ekstradisi tidak dapat dilakukan terhadap kejahatan politik”.

Secara normatif tidak dikenal istilah tindak pidana/delik politik, di dalam praktik dan dunia akademisi dikenal adanya istilah

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 2.

² Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm. 118.

delik politik.³ Menurut Barda Nawawi Arief, secara garis besar kejahatan politik dikategorikan dalam dua kelompok yaitu, kejahatan oleh pemegang kekuasaan dan kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Kategori pertama dilakukan oleh pejabat/penguasa/politikus dan kategori kedua dilakukan oleh warga masyarakat.⁴

Mengingat dalam Undang-Undang Terorisme terkhususnya Pasal 5 merumuskan bahwa tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik. Dengan demikian kejahatan ataupun delik politik tidak bisa menggunakan pendekatan Undang-Undang Terorisme. Jika dikaitkan dengan penetapan status KKB di Papua sebagai terorisme,⁵ akan menimbulkan suatu persoalan hukum dalam kebijakan penetapannya dalam hukum pidana Indonesia serta akibat hukum dari penetapan tersebut secara hukum positif. Ditambah lagi belum adanya definisi terkait apa yang dimaksud dengan tindak pidana politik dalam hukum positif di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini karena KKB di Papua adalah kelompok separatis dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana/delik politik. Adapun penulis mengatakan demikian, hal ini sejalan dengan tuntutan KKB yang disampaikan oleh Gatot Nurmantyo yaitu pertama bubarkan Freeport, kedua militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan keamanan PBB, ketiga Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 102.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 177.

⁵ <https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasan-masif/>, diakses, tanggal 14 Mei 2021.

⁶ <https://www.kompas.com/nasional/read/2017/11/23/12152141/kkb-di-papua-bermuatan-politik-siapa-di-belakangnya>, diakses, tanggal, 23 September 2021.

berjudul “*Analisis Yuridis Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua Sebagai Terorisme*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penetapan status kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai terorisme dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum penetapan status kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai terorisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penetapan status kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai terorisme dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum penetapan status kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai terorisme.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Secara teoritis diharapkan penelitian ini menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam Ilmu Hukum, khususnya bidang Hukum Pidana, sekaligus menjadi rujukan akademik terkait analisis yuridis penetapan status kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai terorisme.

D. Kerangka Teori

1. Asas Kepastian Hukum

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yakni, keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*).⁷

Kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *security*, *rechtszekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum

⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 01, No. 01 Juli 2019, hlm. 14.

itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah “*law Sicherheit durch das Recht*,” seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁸

Adapun kepastian hukum menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki diuraikan sebagai berikut: Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁹

Dapat dikatakan pencapaian kepastian hukum itu terbagi atas dua unsur utama, *pertama*, hukumnya (undang-undang) itu sendiri. Dalam arti, hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir. Lalu yang *kedua*, kekuasaan itu sendiri, yang memberlakukan hukum (undang-undang) itu. Dalam arti, kekuasaan itu tidak boleh secara semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif, dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas.

⁸ Achamad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta: 2013, hlm. 292-293.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013, hlm. 137.

Selain diikuti dengan sebuah struktur kekuasaannya yang berdasar *trias politica*, sehingga bisa menjamin adanya kepastian hukum.¹⁰

Menurut Cesare Beccaria, jika kekuasaan untuk menafsirkan hukum merupakan kejahatan, maka ketidakjelasan dalam hukum pastinya merupakan kejahatan lain, karena yang pertama adalah konsekuensi dari yang kedua. Kejahatan ini akan semakin besar bila hukum itu ditulis dalam bahasa yang tidak diketahui masyarakat; yang, karena tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakannya, menjadi perlu bergantung pada segelintir orang, yang merupakan penafsir hukum yang, alih-alih menjadi publik dan umum, malah menjadi privat dan khusus.¹¹

2. Teori Positivisme Hukum

Istilah positifisme berasal dari kata “*ponere*” yang berarti meletakkan, kemudian menjadi bentuk pasif “*positus-a-um*” yang berarti diletakkan. Dengan demikian, positivisme menunjukkan pada sebuah sikap atau pemikiran yang meletakkan pandangan dan pendekatannya pada sesuatu. Umumnya *positivism* bersifat empiris.¹²

Aliran hukum positif analitis (*analytical jurisprudence*) dari John Austin, mengatakah bahwa, hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Dalam bukunya *The Province of Jurisprudence Determined*, Austin menyatakan “*A law is a command which obliges a persons... law and other commands are said to proceed from superiors, and to bind or ablige inferiors*”.¹³

Hukum selalu merupakan hukum positif, dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan

¹⁰ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Prenadamedia Group Jakarta: 2019, hlm. 178.

¹¹ Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan Dan Hukuman*, (Terjemahan Wahmuji), Genta Publishing, Yogyakarta: 2011, hlm. 14.

¹² Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2020, hlm. 79.

¹³ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok: 2020, hlm. 102.

oleh tindakan manusia, terlepas dari moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri.¹⁴

Hans Kelsen mengatakan teori hukum murni adalah teori hukum positif. Ia merupakan teori tentang hukum positif umum, bukan tentang tatanan hukum khusus. Ia merupakan teori hukum umum, bukan penafsiran tentang norma hukum nasional atau internasional tertentu; namun ia menyajikan teori penafsiran.¹⁵

Hans Kelsen mengatakan bahwa, *“to free the concept of law from the idea of justice is difficult, because they are constantly confused both in political thought and in general speech, and because this confusion corresponds to the tendency to let positive law appear as just. In view of this tendency, the effort to deal with law and justice as two different problems falls under the suspicion of dismissing the requirement that positive law should be just. But the pure theory of law simply declares itself incompetent to answer either the question whether a given law is just or not, or the more fundamental question of what constitutes justice. The pure theory of law-a science-cannot answer these questions because they cannot be answered scientifically at all”*.¹⁶

Untuk menjadi “hukum”, sehingga teori menerimanya, sistem negara positif harus memberikan beberapa perhatian pada keadilan, memastikan menjadi minimum etis, mengusahakan, meskipun tidak memadai, menjadi hukum yang “benar”, yaitu hukum yang adil. Untuk menjadi “hukum” hukum positif harus menyesuaikan beberapa ukuran, meskipun sedikit, dengan konsep hukum, dengan keadilan.¹⁷

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung: 2006, hlm. 164.

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung: 2007, hlm. 1.

¹⁶ Hans Kelsen, “The Pure Theory Of Law And Analytical Jurisprudence”, *Harvard Law Review*, Harvard Law School, 55 Harv. L. Rev. 44, November 1941, hlm. 1

¹⁷ Hans Kelsen, *Pengantar Teori hukum*, (Terjemahan Siwi Purwandari), Penerbit Nusa Media, Bandung: 2019, hlm. 54.

E. Kerangka Konseptual

1. Akibat hukum adalah kibat yang timbul dari suatu hubungan hukum, yang diberikan oleh hukum. Akibat hukum dapat berwujud lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu norma hukum tertentu. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi privat.¹⁸
2. Separatisme adalah suatu aliran/paham yang bertujuan untuk memisahkan diri dan mendirikan suatu negara bagian yang terlepas dari negara kesatuan.¹⁹
3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.²⁰
4. Kejahatan politik adalah Kejahatan dimana dua pihak berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik dalam suatu negara di mana kejahatan itu dilakukan, bahwa kejahatan itu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan perkecualian kaum anarkis dan teroris.²¹

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 5.

¹⁹ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 95.

²⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

²¹ Dasrila W. D. Siregar, “Tinjauan Yuridis Tentang Pembedaan Tindak Pidana Politik Dengan Tindak Pidana Terorisme”, *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 8, No. 9 September 2019, hlm. 88.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka.²² Penelitian hukum normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Yaitu penelitian hukum normatif terhadap *asas kepastian hukum*, dimana kebijakan pemerintah dalam penetapan status kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai terorisme tidak adanya kepastian hukum karena kebijakan tersebut tidak sesuai hukum pidana yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.²³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok: 2019, hlm. 13.

²³ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2012, hlm. 75.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder meliputi rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.²⁴

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, bibliografi dan seterusnya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan metode kajian pustaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁶

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁷

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

1. Keamanan Negara

Konsepsi mengenai keamanan negara berawal dari teori kedaulatan negara. Menurut ajaran ini, negaralah sumber kedaulatan dalam negara. Dari itu negara (*gouvernement* = pemerintah) dianggap mempunyai hak yang tidak terhingga terhadap *life, liberty* dan

²⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung: 2013, hlm. 67.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 24.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 107.

property dari warganya. Warga negara beserta hak miliknya tersebut, bila perlu dapat dikerahkan untuk kepentingan negara. Mereka taat kepada hukum bukan karena suatu perjanjian tapi karena hukum itu adalah kehendak negara.²⁸

Menurut doktrin kedaulatan negara, sebagai badan hukum, negara yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dan bukan raja, rakyat atau Tuhan. Kedaulatan negara secara tegas mengemukakan doktrin “kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan tetapi ada pada negara. Negaralah, yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk pada negara”.²⁹

2. Kejahatan terhadap Keamanan Negara

Delik terhadap keamanan negara semula diatur dari Pasal 104-139 tetapi beberapa yang sudah dicabut antara lain Pasal 139. Selain itu juga telah disisipkan delik ideologi, yaitu Pasal 107a, 107b, 107c, 107d, 107e, dan 107f. Delik ideologi ini mengenai penyebaran ideologi komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya.³⁰

Jika melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku di tanah air, terlihat bahwa Buku II KUHP dengan empat buah bab pertama mengatur apa yang di dalam doktrin sering disebut dengan sebutan *staatkundige misdrijven* atau kejahatan-kejahatan ketatanegaraan. Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, secara konkret yang disebut sebagai tindak pidana yang ditujukan terhadap kepentingan hukum dari negara di dalam kitab pelajaran itu ialah tindak pidana yang diatur dalam Bab-Bab I, II, III, IV, VIII, IX, dan XXVIII Buku II KUHP.³¹ Selain itu kejahatan terhadap keamanan negara dapat dilihat pada masa berlakunya Undang-

Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

B. Tinjauan Umum Kejahatan Politik

1. Pengertian Kejahatan/Delik Politik

Delik politik dapat dibagi atas delik politik murni dan delik politik campuran. Delik politik yang murni, yaitu tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum di dalam Bab I Buku II seperti Pasal 107 KUHP. Di sini termasuk *Landes Verrat* dan *Hchverrat*. Di dalam Konferensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut “Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ”.³² Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum) seperti pembunuhan seorang tiran. Di sini pembunuhan politik.³³

Menurut Loebby Loqman, “delik politik adalah delik yang terumuskan dalam undang-undang hukum pidana politik yang menggunakan motif politik. Sedangkan motifasi politik adalah menyalahi (membahayakan atau mengganggu) pelaksanaan hukum kenegaraan”.³⁴

2. Kejahatan Politik

Delik politik adalah delik yang tujuannya diarahkan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHP. Di Indonesia dikenal pula delik-delik politik yang dahulu pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia belum dikenal, yaitu delik subversi, yang pada masa Orde Lama diatur di dalam Penpres No. 11 Tahun 1963, oleh karena konon kabarnya DPRGR menolak untuk dijadikan undang-undang. Di dalam penjelasan Penetapan Presiden tersebut disebut bahwa delik subversi berunsurkan politik. Penpres tersebut oleh DPR Orde Baru dijadikan Undang-Undang Tindak Pidana Subversi (UU No. 11 (PNPS) 1963 tanpa mengubah redaksinya, sehingga dalam Penjelasannya masih terdapat istilah Orde

²⁸ Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2015, hlm. 44.

²⁹ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, 2014, hlm. 231.

³⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta:2016, hlm. 213.

³¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 3-4.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2014, hlm. 110.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm. 101.

³⁴ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta: 1993, hlm. 51.

Lama seperti Manipol, revolusi, sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.³⁵

Teguh Prasetyo mengatakan delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.³⁶

Dalam kebijakan legislatif atau formulatif selama ini, tidak ada suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai “kejahatan/tindak pidana politik”. Menurut Barda Nawawi, ada beberapa macam kejahatan politik, yaitu kejahatan terhadap negara/keamanan negara, kejahatan terhadap sistem politik, kejahatan terhadap sistem kekuasaan, kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar (HAM) dalam bermasyarakat/bernegara/berpolitik, kejahatan yang mengandung unsur/motif politik, kejahatan dalam meraih/mempertahankan/menjatuhkan kekuasaan, kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik, kejahatan oleh negara/penguasa/politikus, dan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.³⁷

C. Tinjauan Umum Separatisme

1. Pengertian Separatisme

Menurut Kamus Hukum karya Sudarsono, separatisme adalah aliran atau paham yang mencari keuntungan dengan pemcah belahan dalam suatu bangsa atau golongan/kelompok.³⁸ Separatis adalah golongan atau kelompok (orang) yang memakai paham memecah belah persatuan golongan/bangsa dengan maksud untuk mendapat dukungan.³⁹ Istilah Separatis atau separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara

atau bangsa merdeka. Orang-orang yang terlibat didalamnya disebut kaum separatist.⁴⁰

Dalam hukum pidana, separatisme tergolong sebagai kejahatan keamanan negara sebagaimana diatur dalam 106 KUHP tentang makar terhadap wilayah negara. Menurut penulis, Pasal 106 KUHP ini adalah pasal yang paling tepat untuk menjerat secara hukum pidana gerakan separatisme di Indonesia. Karena separatisme adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari wilayah negara.

Dalam hukum internasional kaum separatis dikenal dengan istilah *Belligerent*. Menurut pandangan hukum internasional, kejadian-kejadian dalam suatu negara, termasuk di dalamnya pemberontakan dari kaum separatis merupakan urusan intern negara yang bersangkutan. Hukum yang berlaku pada peristiwa pemberontakan tersebut adalah hukum nasional negara yang bersangkutan.⁴¹

2. Penyebab Separatisme

Ada beberapa penyebab munculnya separatisme dalam suatu negara. Menurut Metta Spencer menyebut ada beberapa faktor penyebab yang bervariasi antara nasionalisme dan separatisme, yaitu: pertama, *emotional resentment*, beberapa analisis dari psikologi sosial tentang nasionalisme pada dasarnya terkait dengan sentimen emosional, termasuk anggapan adanya “*rival community*”, perasaan yang irasional. Kedua, alasan perlawanan dari para korban (*the justified resistance of victim*). Ketiga, propaganda kekuatan-kekuatan politik (*propaganda orchestrated for political gain*). Keempat, kelompok etnik yang dominan dalam kekuasaan (*the power of a dominant ethnic group*). Kelima adalah motivasi ekonomi (*economic motivations*). Kelima hal itu merupakan sumber terjadinya separatisme. Selain sumber-sumber tersebut, faktor struktural tertentu pun memiliki kontribusi atas terjadinya separatisme. Faktor

³⁵ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 365-366.

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 62.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 176-177.

³⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm. 435.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 434-435.

⁴⁰ Sefriani, “Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka”, *UNISA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Universitas Islam Indonesia, No. 47, July XXVI, Triwulan I 2003, hlm. 41.

⁴¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm. 150.

tersebut adalah faktor etnisitas yang menjadi basis ideologi dalam suatu wilayah, sentralisasi dan desentralisasi sistem pemerintahan, prospek negara baru, adanya manipulasi demografi dan politik aneksasi (*political annexation*), ambiguitas hukum internasional, karena kebanyakan para separatist percaya bahwa gerakan mereka akan mendapat dukungan dari pihak internasional.⁴²

D. Tinjauan Umum Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum, teror adalah pemerintahan atau perbuatan sewenang-wenang yang kejam dan bengis; usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seorang atau golongan dengan maksud dan tujuan tertentu. Kemudian, teroris adalah pihak atau orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut (biasanya untuk tujuan politik) atau tujuan lain. Sementara itu, terorisme adalah suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu terutama tujuan politik; tindakan-tindakan keras yang dipraktekkan oleh pihak tertentu.⁴³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, merumuskan bahwa “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

2. Penyebab Terorisme

Ada beberapa alasan mengapa perbuatan-perbuatan terorisme dilakukan, yaitu :

- a. Motivasi kelompok teroris didasarkan pada ekstremisme agama, biasanya, hal ini diawali dengan membangun komunitas yang eksklusif sebagai

modal dan identitas kelompok. Anggota kelompok yang menyakini hanya dirinya saja yang paling benar dan paling dekat dengan pintu surga.

- b. Kelompok teroris melakukan aksi teror dengan tujuan memperoleh kemerdekaan politik yang di dorong oleh keinginan untuk mendapatkan ekonomi yang luas atau yang lebih besar di wilayah yang bersangkutan. Pemicunya adalah karena mereka merasa diperlukan tidak adil oleh pemerintah pusat sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial.
- c. Kelompok teroris cenderung melakukan aksinya demi kepentingan politik, ekonomi dan sosial dengan tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu, seperti menutupi proses hukum atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan dimasa lalu atau sebagai *bargaining* untuk mendapatkan posisi dibidang politik, ekonomi dan sosial. Aksi teror akan semakin meningkat manakala suatu negara mengalami ketidaksabilan dalam situasi politik dan ekonomi.⁴⁴

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai Terorisme dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua

Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau disingkat KKB di Papua adalah suatu kelompok yang benih-benihnya telah ada sejak lama yaitu pada awal kemerdekaan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kelompok ini berawal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) meskipun pada perkembangannya kelompok ini terpecah-pecah dalam berbagai kelompok.

⁴² Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Kajian Tentang Konsensus Normatif Antara RI-GAM Dalam Perundingan Helsinki*, Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta: 2008, hlm. 45-46.

⁴³ Sudarsono, *Op.cit.*, hlm. 495-496.

⁴⁴ Doni Wijaya Munte, “Analisis Hukum Terkait Definisi Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroisme”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 47-48.

Hingga saat ini kelompok ini (KKB di Papua) telah memiliki beberapa peristilahan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Istilah-istilah yang diberikan kepada kelompok ini terdiri dari, Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSJ), dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan terakhir kelompok ini telah di cap oleh Pemerintah Indonesia sebagai kelompok teroris.

Adapun KKB di Papua yang telah dimasukkan ke dalam DTTOT adalah sebagai berikut :

1. Lekagak Telengen (DPO) yang merupakan komandan operasi TPN/OPM wilayah Yambi, Gome, Sinak dan Ilaga Kabupaten Puncak dengan kekuatan personel sebanyak 50 orang.
2. Egianus Kogoya (DPO) yang merupakan Pangkodap TPN/OPM Ndugama beroperasi di wilayah Kabupaten Nduga dengan kekuatan personel sebanyak 50 orang.
3. Militer Murib (DPO) yang merupakan pimpinan TPM/OPM wilayah Kabupaten Puncak dengan kekuatan personel 20 orang.
4. Germanius Elobo (Pimpinan OPM Kali Kopi) dengan kekuatan personel 30 orang.
5. Sabinus Waker, pimpinan KKB Intan Jaya dengan kekuatan personel 50 orang, kekuatan senjata sebanyak 17 pucuk senjata.⁴⁵

2. Perbedaan Separatisme dan Terorisme Prespektif Hukum Pidana Indonesia

Menurut penulis, separatisme dan terorisme dalam hukum pidana Indonesia merupakan dua hal yang berbeda. Separatisme dalam konteks Hukum Pidana Indonesia lebih kepada tindak pidana makar yang terdapat dalam Buku II KUHP khususnya Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 yang merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

⁴⁵ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/407706/bnpt-tetapkan-lima-nama-di-papua-sebagai-dttot>, diakses, tanggal, 22 November 2021.

Sementara terorisme telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Separatisme⁴⁶ hanya menginginkan sebagian dari wilayah negara baik atas dasar etnik maupun politik, sehingga gerakan separatisme tidak bertujuan untuk menguasai seluruh wilayah negara. Jika dilihat motif dari gerakan separatisme maka kelompok separatisme adalah kelompok yang berlatar belakang politik atau motif politik. Sehingga, mereka tidak dapat diekstradisi karena mereka memiliki motif politik. Separatisme bertujuan untuk memisahkan diri dari wilayah negara yang dilakukan secara terang-terangan serta apabila telah memenuhi syarat, maka masyarakat internasional dapat memberikan pengakuan terhadap kelompok tersebut.

Definisi terorisme hingga saat ini masih belum ada kesepakatan menurut para ahli. Namun demikian, definisi terorisme telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, menurut Undang-Undang tersebut, “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Akan tetapi, terkait definisi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut mendapatkan batasan dari Pasal 5 Undang-Undang Terorisme itu sendiri. Di mana dirumuskan bahwa “Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini menyebabkan tidak konsistensinya rumusan definisi terorisme yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2).

Terorisme adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara diam-diam atau rahasia serta bersifat internasional dalam artinya korbanya

⁴⁶ Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan...*, *Op.cit*, hlm. 7.

tidak hanya masyarakat regional atau nasional saja, akan tetapi korbannya dapat berasal dari masyarakat internasional. Berbeda dengan kelompok separatis, kelompok terorisme hingga samapai kapanpun tidak akan pernah mendapat dukungan dari masyarakat internasional kerana kejahatan terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat mengganggu keamanan negara serta kedamaian dunia apabila dibiarkan. Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme adalah tindak pidana yang bersifat internasional. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2002, di mana negara lain juga mempunyai yurisdiksi melakukan penuntutan terhadap pelaku terorisme. Dengan demikian, terorisme dalam hukum pidana indonesia adalah kejahatan yang bersifat internasional.

3. Permasalahan Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai Terorisme dalam Hukum Pidana Indonesia

Penetapan KKB di Papua sebagai terorisme menurut penulis tidak memiliki kepastian hukum karena kebijakan pemerintah memasukan KKB di Papua dalam DTTOT tidak sesuai hukum positif yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga, seharusnya segala kebijakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 5 undang-undang tersebut jelas dikatakan bahwa “Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jika dikaitkan dengan tindakan KKB di Papua yang merupakan suatu tindakan yang mengadung motif politik yaitu ingin merdeka dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang jelas tidak dapat dikatakan sebagai terorisme. Hal ini dapat dilihat dari tuntutan KKB di Papua sebagaimana yang disampaikan oleh Gatot Nurmantyo yaitu pertama bubarkan Freeport, kedua militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan

keamanan PBB, ketiga Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum.⁴⁷ Sehingga, seharusnya KKB di Papua masih dalam ketegori kelompok separatis yang ditindak dengan pasal-pasal makar yang terdapat dalam KUHP.

KKB di Papua adalah suatu kelompok yang beraktifitas di wilayah Papua saja. Mereka tidak pernah melakukan gerakan untuk menyerang wilayah atau provinsi lain di Indonesia bahkan mereka bukanlah organisasi yang bersifat internasional seperti organisasi teroris. Sementara, terorisme dalam melakukan perbuatannya tidak memandang bulu siapa korbannya, serangan yang bersifat acak bahkan kejahtannya dapat dilakukan di lintas negara.

Tidak satu pun negara di dunia ini yang mendukung suatu aksi terorisme, bahkan negara-negara terus berusaha dan bekerja sama untuk menghancurkan kelompok tersebut. Berbeda dengan separatisme, separatisme memang pada tahap awalnya tidak langsung mendapat dukungan dari negara lain, namun apabila separatisme tersebut telah memenuhi syarat sebagai *belligerent* dan negara-negara lain tidak dapat menutup mata lagi, maka separatisme tersebut mendapatkan dukungan dari negara lain untuk diakui sebagai negara yang merdeka.

KKB di Papua tidak memenuhi unsur-unsur terorisme sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Unsur pertama yang tidak dipenuhi adalah unsur teror atau rasa takut secara meluas, hal ini karena perbuatan KKB di Papua tidak menimbulkan suasana teror secara meluas, aktivitas-aktivitas mereka hanya terjadi di wilayah Papua serta tidak terjadi wilayah lain Indonesia. Unsur kedua yang menjadi permasalahan adalah unsur motif politik. Motif politik dalam Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengalami depolitisasi oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga, KKB di Papua yang bermotif politik tidak dapat ditindak berdasarkan undang-undang ini. Kemudian melihat tindak pidana

⁴⁷ <https://www.kompas.com/nasional/read/2017/11/23/12152141/kkb-di-papua-bermuatan-politik-siapa-di-belakangnya>, diakses, tanggal, 23 September 2021.

terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bersifat tindak pidana internasional, maka KKB di Papua yang merupakan kelompok yang melakukan serangan hanya di wilayah Papua, tidak dapat ditindak berdasarkan tindak pidana terorisme.

B. Akibat Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai Terorisme

1. Perubahan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Setelah Ditetapkan sebagai Terorisme

Setelah penetapan status KKB di Papua sebagai terorisme, maka akibat hukumnya adalah penegakan hukum terhadap kelompok tersebut akan berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini karena Undang-Undang Terorisme merupakan undang-undang khusus dan terkadang menyimpang dari aturan umum hukum pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana makar yang terdapat dalam KUHP berpedoman pada KUHP, Sementara penegakan hukum dalam Undang-Undang Terorisme menggunakan hukum acara khusus yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

Dalam penegakan hukum terhadap KKB di Papua yang telah dimasukkan dalam DTTOT, maka akan melibatkan aparat penegak hukum seperti Densus 88, dan TNI. Keterlibatan Densus 88 dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 24 yang merumuskan "Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang selanjutnya disingkat Densus 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan kejahatan

terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri".

2. Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai Terorisme

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan.⁴⁸ Pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggungjawab.⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana KKB di Papua sebagai terorisme menurut penulis tidak ada. Hal ini karena untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana seseorang pelaku tindak pidana harus terbukti melakukan tindak pidana. Namun demikian, jangankan memiliki kesalahan, tindak pidana terorisme yang di tuduhkan kepada KKB di Papua tidak memenuhi unsur tindak pidana terorisme. Hal ini karena ruang lingkup tindak pidana terorisme dikecualikan atau dianggap bukan tindak pidana politik. KKB di Papua adalah kelompok separatis yang memiliki motif politik yaitu ingin memisahkan wilayah Papua dari NKRI bukan bertujuan untuk menakut-nakuti atau menyorot warga negara Indonesia.

Seharusnya KKB di Papua menurut penulis dijerat berdasarkan pasal-pasal makar yang terdapat dalam KUHP, seperti Pasal 106 KUHP yang merumuskan "makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2016, hlm. 153.

⁴⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, *Op.cit*, hlm. 109.

atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”. Pasal ini menurut penulis lebih tetap diterapkan kepada KKB di Papua, karena kelompok tersebut sebenarnya ingin memisahkan wilayah Papua dari NKRI bukan bertujuan untuk meneror atau menakut-nakuti warga negara.

Akibat hukum penetapan KKB di Papua sebagai terorisme akan membuat KKB di Papua tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena KKB di Papua dapat beralasan bahwa mereka bertujuan politik, sehingga mereka tidak dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Karena untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus ada tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Apabila kedua hal tersebut tidak terbukti di persidangan, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Maka KKB di Papua apabila diadili nantinya akan di putus bebas sebagaimana dirumuskan Pasal 191 ayat (1) KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dapat dikatakan bahwa kelompok ini berawal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) ,meskipun pada perkembangannya kelompok ini terpecah-pecah dalam berbagai kelompok dan kini telah ditetapkan sebagai terorisme. Kegiatan separatisme dan terorisme dalam hukum pidana Indonesia merupakan dua hal yang berbeda. Penetapan KKB di Papua sebagai tidak memiliki kepastian hukum karena kebijakan pemerintah memasukan KKB di Papua dalam DTTOT tidak sesuai hukum positif yang berlaku. KKB di Papua tidak dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 karena KKB di Papua adalah kelompok separatis yang bermotif politik.

2. Setelah penetapan status KKB di Papua sebagai terorisme, maka akibat hukumnya adalah penegakan hukum terhadap kelompok tersebut akan berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini karena Undang-Undang Terorisme merupakan undang-undang khusus dan terkadang menyimpang dari aturan umum hukum pidana. Akibat hukum penetapan KKB di Papua sebagai terorisme akan membuat KKB di Papua tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena KKB di Papua dapat beralasan bahwa mereka bertujuan politik, sehingga mereka tidak dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Terorisme. Karena untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus ada tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Apabila kedua hal tersebut tidak terbukti di persidangan, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

1. Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua adalah kelompok separatisme yang bertujuan untuk merdeka dari NKRI. Untuk itu diperlukan upaya non penal untuk mengatasi konflik tersebut sehingga tetap memperhankan keutuhan wilayah NKRI. Penetapan status KKB di Papua sebagai terorisme tidaklah sesuai hukum positif yang berlaku, sehingga penetapan status KKB di Papua sebagai terorisme haruslah dicabut.
2. Penetapan KKB di Papua sebagai terorisme bukanlah upaya solitif. Pemerintah dalam mengatasi konflik separatisme di Papua harus memperhatikan aspek kemanusiaan serta kepentingan rakyat Papua. Meskipun telah ada otonomi khusus, namun implementasi otonomi khusus tersebut masih belum maksimal, sehingga kelompok-kelompok

separatis di Papua masih ada hingga hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achamad, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- _____, 2010, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aprita Serlika, dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Beccaria, Cesare, 2011, *Perihal Kejahatan Dan Hukuman*, (Terjemahan Wahmuji), Genta Publishing, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2015, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Farid, H.A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariri, Wawan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung.
- _____, 2007, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung.
- _____, 2019, *Pengantar Teori hukum*, (Terjemahan Siwi Purwandari), Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loqman, Loebby, 1993, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Manullang, E. Fernando M., 2019, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Prenadamedia Group Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurhasim, Moch., 2008, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka Kajian Tentang Konsensus Normatif Antara RI-GAM Dalam Perundingan Helsinki*, Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sefriani, 2016, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sibuea, Hotma P. 2014, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga.Suadi, Amran, 2020, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Dasrila W. D. Siregar, 2019, "Tinjauan Yuridis Tentang Perbedaan Tindak Pidana Politik Dengan Tindak Pidana Terorisme", *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 8, No. 9 September.

Doni Wijaya Munte, 2020, "Analisis Hukum Terkait Definisi Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroisme", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Hans Kelsen, 1941, "The Pure Theory Of Law And Analytical Jurisprudence", *Harvard Law Review*, Harvard Law School, 55 Harv. L. Rev. 44, November.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 01, No. 01 Juli.

Sefriani, 2003, "Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka", *UNISA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Universitas Islam Indonesia, No. 47, Juli XXVI, Triwulan I.

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Diumumkan pada tanggal 26 Februari 1946.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1981, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1981.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130.

D. Website

<https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasan-masif/>, diakses, tanggal 14 Mei 2021.

<https://www.kompas.com/nasional/read/2017/11/23/12152141/kkb-di-papua-bermuatan-politik-siapa-di-belakangnya>, diakses, tanggal, 23 September 2021.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/407706/bnpt-tetapkan-lima-nama-di-papua-sebagai-dttot>, diakses, tanggal, 22 November 2021.